

**LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN**

(LKPJ)

NAGARI KINALI

TAHUN 2015



PEMERINTAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

KECAMATAN KINALI

TAHUN 2016

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. DASAR HUKUM.....	1
B. GAMBARAN UMUM NAGARI.....	2
1. KONDISI GEOGRAFIS.....	2
2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS.....	2
3. KONDISI EKONOMI.....	3
a. Potensi unggulan Nagari.....	3
b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB.....	5
BAB II : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI.....	6
A. Visi dan Misi.....	6
B. Strategi dan Arah Kebijakan Nagari (sesuai Rencana Pembanguna.....	6
Menengah Nagari.....	7
C. Prioritas Nagari.....	7
BAB III : KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.....	9
A. PENGELOLAAN PENDAPATAN NAGARI.....	9
1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi.....	9
2. Target dan realisasi Pendapatan.....	10
3. Permasalahan dan penyelesaian.....	16
B. PENGELOLAAN BELANJA NAGARI.....	17
1. Kebijakan Umum Keuangan Nagari.....	17
2. Target dan realisasi Belanja.....	17
3. Permasalahan dan penyelesaian.....	18
BAB IV : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN NAGARI.....	19
A. URUSAN HAK ASAL USUL NAGARI.....	19
1. Program dan Kegiatan.....	19
2. Permasalahan dan penyelesaian.....	21
B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN/ KOTA.....	21
1. Program dan Kegiatan.....	21
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan.....	22
3. Permasalahan dan penyelesaian.....	22
BAB V : PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN.....	23
A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA.....	23
1. Dasar Hukum.....	23
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan.....	23
3. Satuan Kerja Perangkat Nagari.....	23
4. Kegiatan yang diterima.....	23
5. Sumber dan Jumlah Anggaran.....	23
6. Permasalahan dan penyelesaian.....	24
B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN.....	24
1. Dasar Hukum.....	24
2. Urusan Pemerintahan yang ditugas pembantuan.....	24
3. Sumber dan Jumlah Anggaran.....	25
4. Sarana dan Prsarana.....	25
PENUTUP.....	25

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji beserta syukur kehadirat Allah SWT, kita masih dapat limpahan Rahmad dan karuniaNya sehingga Kita dapat membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Nagari Tahun 2015.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Nagari Kinali ini adalah Laporan Kegiatan Wali Nagari Kinali pada Tahun kedua dalam masa bakti enam tahun, Laporan ini meliputi Kebijakan umum, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Nagari, Penyelenggaraan Tugas Perbantuan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan lainnya.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Wali Nagari yang dilandasi oleh Peraturan Nagari No : 02 tahun 2015 yang memuat tentang Program Kerja Tahun 2015.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kegiatan Wali Nagari disusun berdasarkan Program Kerja Tahun 2015 dan APB Nagari Tahun 2015, sebagai berikut :

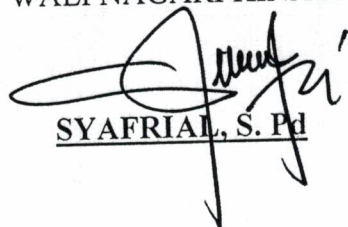
1. Kebijakan umum Pengelolaan Keuangan Nagari
 - a. Pengelolaan Pendapatan Nagari
 - b. Pengelolaan Belanja Nagari
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Nagari.
 - a. Urusan Hak Asal – Usul Nagari.
 - b. Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten.
3. Penyelenggaraan Tugas Perbantuan.
 - a. Tugas Perbantuan yang diterima.
 - b. Tugas Perbantuan Yang diberikan.
4. Penutup.

Kami sadari bahwa Laporan ini masih terdapat kelemahan untuk itu kami minta kepada Pimpinan Beserta anggota Badan Musyawarah Nagari kinali untuk dapat memberikan kritikan dan saran demi kesempurnaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban untuk masa yang akan datang.

Demikianlah Laporan ini disusun, disajikan dan disampaikan untuk dapat dimaklumi adanya.

Durian Kilangan, Januari 2016

WALI NAGARI KINALI


SYAFRIAL, S. Pd

BAB I PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintah antara pemerintah daerah provinsi, Lembaran Negara Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 14. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun

- 2011 tentang Pemerintahan Nagari;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Pasaman Barat;
 17. Peraturan daerah kabupaten Pasaman Barat Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015;
 18. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Dalam Kabupaten Pasaman Barat;
 19. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015;
 20. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/405/BUP-PASBAR-2015 tentang Penetapan Besaran bantuan Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Dalam Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015;
 21. Peraturan Nagari Kinali Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Anggaran Penerimaan dan Belanja (APB) Nagari Kinali Tahun 2015;
 22. Peraturan Nagari Kinali Nomor 05 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Penerimaan dan Belanja (APB) Nagari Kinali Tahun 2015;

B. GAMBAR UMUM

1. KONDISI GEOGRAFIS

- Ketinggian dari permukaan laut +46 M
- Letak Geografis $00^{\circ} 03' LU - 00^{\circ} 11' LS$ dan $99^{\circ} 45' BT - 99^{\circ} 03' BT$

Luas Wilayah Nagari Kinali 365,57 Km² dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Nagari koto baru kecamatan Luhak Nan Duo.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Tigo Nagari, dan Kabupaten Agam.
- Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Tigo Nagari kabupaten pasaman,
- Sebelah Barat berbatas dengan Nagari Katiagan/ Mandiangin.

2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS

Penduduk Nagari Kinali berdasarkan Laporan petugas Registrasi kependudukan Nagari Kinali tahun 2015

MUTASI PENDUDUK MENURUT NAGARI

Nagari / Jorong	Lahir	Mati	Datang	Pindah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<u>Kinali</u>	1420	318	164	384

- Jumlah Kelahiran 1.420 jiwa.
- Jumlah Kematian 318 jiwa.
- Jumlah Datang 164 jiwa.
- Jumlah Pindah 384 jiwa.

PENDUDUK PER JENIS KELAMIN

Nagari / Jorong	Penduduk			Sex Ratio
	L	P	L+P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<u>Kinali</u>	30.419	35.939	66.358	

Jumlah Penduduk 66.358 jiwa Laki- laki 30.419 jiwa perempuan 35.939 jiwa.

LUAS JORONG, BANYAKNYA RUMAHTANGGA DAN PENDUDUK PER NAGARI / JORONG

Nagari	Luas (Km ²)	RT	Pendd	Rata-rata Pendd	
				KM ²	RT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<u>Kinali</u>	365,57	15.489	66.358	181,5	4

Luas Wilayah administrasi Nagari Kinali 365,57 Km².

Jumlah Kepala Keluarga/RumahTangga 15.489 KK.

Jumlah Penduduk 66.358 Jiwa.

Kepadatan Penduduk rata-rata 181,5 jiwa per kilometer persegi.

Rata -rata jumlah penduduk per KepalaKeluarga/RumahTangga 4 jiwa per KK

3. KONDISI EKONOMI

a. Potensi Unggulan Nagari

1) Perkebunan

Mayoritas wilayah Nagari Kinali didominasi oleh perkebunan sawit swasta, BUMN dan perkebunan sawit rakyat. Dinamika perkembangan Perkebunan Sawit di Nagari Kinali cukup maju pesat sehingga hal ini berdampak kepada :

- Meningkatnya Pertumbuhan Perkapita Anak Nagari Kinali dari tahun ketahun, dengan meningkatnya pertumbuhan

ekonomi Anak Nagari hal ini sangat berpengaruh terhadap factor-faktor lainnya.

- ii. Nagari Kinali merupakan salah satu barometer perdagangan sawit di daerah Pasaman Barat Khususnya dan sekitarnya. Hal ini didukung oleh 3 Perusahaan Pabrik Sawit.
- iii. Hal ini secara langsung juga telah menambah lapangan pekerjaan baik disektor perkebunan dan juga industri.
- iv. Dampak Pertumbuhan sector perdagangan juga sangat kuat di daerah industry, hal ini dibuktikan dengan arus transportasi yang semakin padat oleh hasil industry contohnya : CPO, Karnael, cangkang sawit dan juga limbah pabrik lainnya.
- v. Dampak Pertumbuhan sector Pendidikan juga semakin meningkat hal ini dibuktikan dengan hasil Wisudawan SI & SII semakin banyak.
Diharapkan dengan peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia di Nagari Kinali Kedepan akan terwujudlah VISI dan MISI Nagari Kinali.

2) Pertanian/hortikultura

- i. Jagung juga merupakan Produk Unggulan, hal ini juga sangat memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya Petani Jagung, dan juga telah banyak membuka lapangan pekerjaan baru misalnya :agen jagung yang juga mempekerjakan beberapa karyawan.
- ii. Produksi Jagung pada saat ini masih dipergunakan sebagian besar untuk bahan dasar pakan ternak yang diproduksi di beberapa kota/kabupaten disekitar Nagari Kinali misalnya di Kota Padang, Kota Payakumbuh dan hanya sebagian kecil diproduksi didalam Nagari Kinali.

3) Pariwisata

Di Nagari Kinali ada beberapa objek Wisata unggulan namun hal ini belum dikelola secara professional karena investor belum ada yang tertarik dengan potensi dimaksud diantaranya:

- Muaro Bingung di Ampek Koto
- Objek Wisata Islam Ikan Larangan Silambau
- Batu Balipek di Kampung Kurai
- Pemandian Mata air di Air Meruap
- Air terjun Siburai-burai di Durian Tibarau
- Air terjun Siburai-burai di Durian Kandang.
- Tabek Gadang Bancah Sopan Air Meruap.

4) Keagamaan

Nagari Kinali juga merupakan salah satu daerah yang kuat dengan aliran Tasawwuf, ini dibuktikan dengan masih kuatnya aliran Tharikat Naqasabandiah yang berkembang, yang berpusat di Durian Tibarau Nagari Kinali, Syech Mudo Abdurrahman adalah seorang ulama yang menyebarkan Tasawwuf ini di daerah Nagari Kinali dan sekitarnya. Bahkan sampai saat ini diperkuat dengan berdirinya beberapa surau tharikata oleh khalifah dan Tuangku sebagai wujud dan kepedulian terhadap perkembangan Tharikat di Nagari Kinali dan Sekitarnya.

b. Pertumbuhan Ekonomi / PDRB

Perekonomian di Nagari Kinali didukung oleh beberapa factor perekonomian, sesuai dengan kondisi wilayah Nagari Kinali :

- 5) Pertanian
- 6) DII

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI

A. VISI DAN MISI

1. **VISI Nagari**

“ MEMBANGUN KINALI BERBASIS PENDIDIKAN BERLANDASKAN ADAT DAN SYARAK “

2. **MISI Nagari**

- a) Memberikan Pelayanan secara adil dan merata
- b) Mengentaskan Buta Huruf
- c) Meningkatkan kualitas Iman dan Tagwa
- d) Melestarikan Adat dan Budaya, bekerjasama dengan Ninik Mamak, tokoh Adat dan tokoh Budaya.

Adapun Makna dari Misi tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Membangun system dan struktur pendidikan yang sejajar dengan standar Nasional serta sesuai dengan kondisi kebutuhan nagari serta membangun system pelayanan yang cepat, tepat, tanggap dan dapat menjangkau seluruh pelosok daerah
2. Membangun manajemen Pemerintahan yang professional sesuai prinsip pemerintahan yang baik (goog govermance).
3. Membangun dan mengembangkan kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan antara semua komponen baik itu aparatut pemerintahan Nagari, masyarakat dan perantau
4. Membangun struktur ekonomi yang kuat danberimbang dengan memunculkan empat wilayah pertumbuhan ekonomi dengan orientasi pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pengelolaan sumber daya alam sebagai sumber penghasilan masyarakat yang produktif, lestari dan berkesinambungan.
5. Membangun kondisi social budaya masyarakat Nagari yang maju dan adaptif dijiwai falsafah Adat Basandi Syara', Syara' basandi Kitabullah. Dan peran aktif dari kelembagaan adat tali tigo sapilin dan tungku tigo sajarangan.

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN NAGARI

1. **STRATEGI PEMBANGUNAN.**

Strategi yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian visi dan misi adalah:

1. Menjadikan rakyat sebagai subjek pembangunan dan tidak semata-mata menjadi objek pembangunan.
2. Meningkatkan , pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan pembangunan.
3. Membangkitkan daya dan kemampuan masyarakat Nagari untuk dapat berusaha sesuai dengan keterampilan dan dukungan potensi Nagari.
4. Mewujudkan Pemerintahan yang professional sebagai pelayan masyarakat dan bukan sebagai penguasa.
5. Meningkatkan pemahaman hukum formal dan hukum adat sehingga tercipta masyarakat Nagari yang bermartabat dan sadar hukum
6. Memanfaatkan momentum otonomi daerah untuk dapat menggali segala potensi sumber daya alam Nagari secara efektif, efisien dan lestari serta meningkatkan pelayanan umum masyarakat yang cepat, tanggap dan berkeadilan.
7. Meningkatkan pendidikan yang berbasis agama/ aqidah

2. ARAH KEBIJAKAN NAGARI.

a) Arah Kebijakan Keuangan Nagari.

Kebijakan yang akan ditempuh dalam pencapaian visi dan misi pembangunan Nagari Kinali periode tahun 2015 – 2020 adalah :

1. Meningkatkan manajemen Pemerintahan Nagari
2. Pelaksanaan pembangunan dengan pola pemberdayaan dan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat dan restrukturisasi manajemen Pemerintahan Nagari.
3. Reorientasi dan restrukturisasi manajemen pendidikan serta rekayasa social dan pengayaan budaya masyarakat.
4. Restrukturisasi perekonomian masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan dengan memunculkan wilayah pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan penyehatan lingkungan.
5. Nilai-nilai agama menjiwa dan mewarnai setiap perilaku dan sikap hidup masyarakat Nagari di setiap bidang kehidupan.

b). Prioritas Nagari

Skala Prioritas yang telah dilaksanakan berdasarkan musrembang tahunan dengan sumber dana APBN, APBD PROVINSI SUMATERA BARAT, APBD KABUPATEN PASAMAN BARAT, PNPM MANDIRI, ALOKASI DANA NAGARI.

Pada dasarnya :

1. Dibidang Pembangunan diprioritaskan untuk peningkatan infrastruktur Nagari.

2. Dibidang Kesehatan Pemerintah Nagari juga memprioritaskan Pembangunan Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan, dan juga program Penyuluhan Kesehatan, Posyandu serta lansia.
3. Dibidang Pendidikan Pemerintahan Nagari melaksanakan Sertifikasi Baca tulis Alquran bagi siswa yang akan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.
4. Dibidang Energi diprioritaskan pada Pembangunan PLTMH, dibidang pertambangan diprioritaskan pada pengawasan terhadap pengelolaan galian c.
5. Bidang Sosial budaya diprioritaskan kepada Pembinaan Kesenian Tradisional.
6. Bidang Ketertiban dan Keamanan diprioritaskan pada Pembangunan Sistem Keamanan Masyarakat (Siskamling).
7. Bidang Keagamaan diprioritaskan pada Penyuluhan oleh Da'I Nagari.

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN NAGARI

1. Intensifikasi Dan Ekstensifikasi

a. Intensifikasi

Intensifikasi diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah Nagari untuk meningkatkan Pendapatan Nagari dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat, dan teliti.

Terdapat beberapa indikator yang membentuk variabel ini yaitu:

1. Memperluas basis Pendapatan, dengan item-item yang membentuknya meliputi:
 - a) Mengidentifikasi Sektor, Jenis dan potensial Pendapatan Nagari.
 - b) Memperbaiki basis data Pendapatan, penilaian
 - c) Menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

Memperkuat proses pemungutan dengan item item yang membentuknya meliputi:

- a) Mempercepat penyusunan Peraturan Nagari,
- b) Mengubah tarif pendapatan nagari dan peningkatan SDM.

2. Meningkatkan pengawasan dengan item-item yang membentuknya meliputi:

- a) Pemeriksaan secara dadakan dan berkala,
- b) Memperbaiki proses pengawasan,

3. Meningkatkan efisiensi

administrasi dan menekan biaya pemungutan dengan item-item yang membentuknya meliputi:

- a) memperbaiki prosedur administrasi pendapatan nagari dan penyederhanaan administrasi pendapatan nagari.
- b) meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

4. Meningkatkan kapasitas

penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik dengan item yang membentuknya meliputi:

meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di Nagari dan Pemerintah daerah. antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a) Memperluas basis penerimaan
- b) Memperkuat proses pemungutan
- c) Meningkatkan pengawasan
- d) Meningkatkan efisiensi administrasi

b. Ekstensifikasi

Ekstensifikasi adalah usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan Nagari yang baru. Namun, dalam upaya ekstensifikasi ini, khususnya yang bersumber dari Sumber daya alam dan Aset Kekayaan Nagari, tidak boleh bertentangan dengan kebijakan Daerah dan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi, yakni pungutan pendapatan asli nagari yang dilaksanakan tidak semata-mata untuk menggali pendapatan nagari berupa sumber penerimaan yang memadai, tetapi juga untuk

melaksanakan fungsi fiscal lainnya agar tidak memberatkan bagi masyarakat. Hal ini merupakan suatu ikatan yang perlu dijalin antara nagari dengan anak nagari akan pentingnya peran aktif anak nagari dalam mewujudkan Pembangunan yang sinambungan dan berkesinambungan. Ekstensifikasi pendapatan Nagari merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh Nagari dalam upaya meningkatkan penerimaan pendapatan asli nagari.

- ❖ Bagaimana Kerjasama Nagari dengan pihak perusahaan industry ?
- ❖ Mampukah Peraturan Nagari menjadi dasar hukum terhadap hasil produk perusahaan industry sebagai Wujud investasikan kepada anak nagari dalam peranserta aktif pembangunan nagari ?
- ❖ Dalam Hal Perbankan, sudah efektifkah system kredit ditengah ekonomi global saat ini terhadap pertumbuhan perkapita anak nagari ?

Kebijakan-kebijakan dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Menciptakan daya tarik dan iklim yang kondusif bagi investor local maupun investor asing untuk menanamkan/ menginvestasikan modalnya di Nagari.
- b. Memberi kemudahan bagi investor lokal maupun investor asing untuk menanamkan/menginvestasikan modalnya di daerah dengan birokrasi yang tidak berbelit-belit.
- c. Keseimbangan Pembangunan yang selaras dengan Sistem Adat, Basandi Syara' , Syara' Basandi Kitabullah. Ideologi ini lah yang menjadi Landasan Idiel dalam kehidupan Anak Nagari. Alam Takambang Jadi guru.
- d. Memprioritaskan investor local untuk menginvestasikan modalnya di Nagari.

2. Target dan Realisasi Pendapatan

Lampiran : Peraturan Nagari Kinali No. 5 Tahun 2015
Tentang :Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Perubahan Tahun Anggaran 2015

KODE REK. NO	URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANNGARAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /(BERKURANG)
1	2	3		
1	PENDAPATAN	2,108,100,038	2,113,750,038	5,650,000
1 1	Pendapatan Asli Nagari	110,000,000	115,650,000	5,650,000
1 1 1	Hasil Usaha		3,000,000	3,000,000
1 1 1 1	Bagi Hasil Koperasi 2015		3,000,000	3,000,000
1 1 2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong			-
	Royong			-
1 1 3	Pendapatan aset	30,000,000	-	(30,000,000)
1 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Nagari Yang Sah	80,000,000	112,650,000	32,650,000
	Pendapatan PAN	80,000,000	112,650,000	32,650,000
1 2	Pendapatan Transfer	1,998,100,038	1,998,100,038	-

1	2	1			Dana Desa (APBN)	497,526,974	497,526,974	-
1	2	2			Bagian dari hasil pajak & retribusi	48,573,064	48,573,064	-
1	2	3			Alokasi Dana Desa	1,440,000,000	-	(1,440,000,000)
1	2	4			Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi/Kabupaten	12,000,000	1,452,000,000	1,440,000,000
1	2	4	1		Dana Bantuan Keuangan Provinsi	12,000,000	12,000,000	-
1	2	4	2		Dana Bantuan Keuangan Kabupaten		1,440,000,000	1,440,000,000
1	3				Pendapatan Lain - lain	-	-	-
1	3	1			Hibah dan Sumbangan dari pihak ke 3 yang tidak mengikat			-
								-
2					BELANJA	2,284,438,835	2,290,088,835	5,650,000
2	1				Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	1,139,161,861	1,119,061,861	(20,100,000)
2	1	1			Penghasilan Tetap dan Tunjangan	649,800,000	664,943,266	15,143,266
2	1	1	1		Belanja Pegawai	649,800,000	664,943,266	15,143,266
2	1	1	1	1	- Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat	420,000,000	420,000,000	-
				2	- Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat	81,600,000	81,600,000	-
				3	- Penghasilan Tetap Bamus dan Anggota	71,400,000	71,400,000	-
				4	- Tunjangan Bamus dan Anggota	25,800,000	25,800,000	-
				5	- PTPKN	36,000,000	36,000,000	-
				6	- Insentif Petugas PAD Nagari	3,000,000	3,000,000	-
				7	- Tunjangan Kesejahteraan Wali Nagari	12,000,000	12,000,000	-
				8	- Insentif Pemungut PAD Perangkat Nagari		9,143,266	9,143,266
				9	- Honor Pemasangan Nomor Rumah		6,000,000	6,000,000
2	1	2			Operasional Perkantoran	437,061,861	395,854,861	(41,207,000)
2	1	2	1		Belanja Barang dan Jasa	205,211,861	163,048,861	(42,163,000)
2	1	2	1	1	- Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah	15,000,000	-	(15,000,000)
				2	- Honor PPTK	700,000	-	(700,000)
				3	- Alat Tulis Kantor	14,736,000	13,936,000	(800,000)
				4	- Belanja Prangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1,200,000	1,320,000	120,000
				5	- Belanja Bahan bakar Minyak	775,000	260,000	(515,000)
				6	- Belanja Cetak dan Pengadaan	22,400,000	18,400,000	(4,000,000)
				7	- Belanja Pemeliharaan Kantor		-	-

				8	- Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	8,640,000	5,350,000	(3,290,000)
				9	- Belanja Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Kantor	8,000,000	7,000,000	(1,000,000)
				10	- Belanja Pemeliharaan Aset Nagari	15,000,000	15,000,000	-
				11	- Belanja Pakaian dinas dan atribut lainnya	20,550,000	28,200,000	7,650,000
				12	- Jasa kantor	13,311,797	7,000,000	(6,311,797)
				13	- Jasa Transportasi	5,525,064	2,145,266	(3,379,798)
				14	- Belanja Makan minum Rapat/ Tamu	5,374,000	5,062,797	(311,203)
				15	- Perjalanan Dinas	60,000,000	29,945,000	(30,055,000)
				16	- Penyusunan Perna dan Laporan Pemerintahan Nagari	-	-	-
				17	- Uang Lembur	5,000,000	5,000,000	-
				18	- Pemasangan Nomor Rumah	9,000,000	-	(9,000,000)
				19	- Operasional Pemungutan PAD dan Belanja Jasa Petugas PAD		24,429,798	
2	1	2	2		Belanja Modal	231,850,000	232,806,000	956,000
2	1	2	2	1	- Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat	50,000,000	47,800,000	(2,200,000)
				2	- Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43,136,797	40,696,797	(2,440,000)
				3	- Belanja Modal Mobiler Kantor/Perlengkapan Kantor	92,713,203	95,509,203	2,796,000
				4	- Belanja Pembangunan Kantor	46,000,000	48,800,000	2,800,000
								-
2	1	3			Operasional Bamus	50,300,000	54,013,734	3,713,734
2	1	3	1		Belanja Barang dan Jasa	50,300,000	54,013,734	3,713,734
2	1	3	1	1	- Honor Sidang Bamus	4,800,000	7,200,000	2,400,000
				2	- ATK	521,000	521,000	-
				3	- Belanja Prangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	78,000	96,000	18,000
				4	- Pengadaan	1,000,000	1,000,000	-
				5	- Belanja Pakaian dinas dan atribut lainnya	7,200,000	7,200,000	-
				6	- Belanja Makan minum Rapat/ Tamu	2,271,000	4,236,734	1,965,734
				7	- Belanja Perjalanan Dinas	32,630,000	33,610,000	980,000
				8	- Biaya Pemeliharaan kantor	1,800,000	150,000	(1,650,000)
2	1	4			Operasional Jorong	2,000,000	2,000,000	-
2	1	4	1		Belanja Barang dan Jasa	2,000,000	2,000,000	-

				1	- Foto Copy	2,000,000	2,000,000	-
								-
2	1	5			Biaya Tim Seleksi Perangkat Pemerintahan Nagari		2,250,000	2,250,000
2	1	5	1		Belanja Barang dan Jasa		2,250,000	2,250,000
2	1	5	1	1	Insentif Panitia Tim Seleksi		2,000,000	2,000,000
2		5	1	2	ATK		250,000	250,000
								-
2	2				Bidang Pelaksanaan Pembangunan	950,000,000	950,000,000	-
2	2	1			Pembangunan Jalan Usaha Tani dan Jembatan Jorong Limpato	100,000,000	100,000,000	-
2	2	2			Pembangunan Los Pasar Nagari Jorong Padang Canduah	125,000,000	125,000,000	-
2	2	3			Pembangunan dan Perkerasan Jalan Usaha Tani Jorong Anam Koto Utara	125,000,000	125,000,000	-
2	2	4			Pembangunan Jalan Usaha Tani anam Koto Selatan	100,000,000	100,000,000	-
2	2	5			Pembangunan dan Perkerasan Jalan Usaha Tani Jorong Tandikek	100,000,000	100,000,000	-
2	2	6			Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Rantau Panjang Jorong Langgam	100,000,000	100,000,000	-
2	2	7			Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Padang Guguak Jorong Langgam Saiyo	100,000,000	100,000,000	-
2	2	8			Pemeliharaan Jalan Usaha Tani dusun I dan II Jorong Bancah Kariang	100,000,000	100,000,000	-
2	2	9			Pembangunan dan Perkerasan Jalan Usaha Tani Bunuik	100,000,000	100,000,000	-
								-
2	3				Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	55,000,000	55,000,000	-
2	3	1			Belanja Kegiatan Bhabinkamtibmas/Babinsa/L inmas Nagari	15,000,000	15,000,000	-
2	3	2			Kegiatan Rakor KAN se Nagari Kinali	25,000,000	25,000,000	-
2	3	3			Kegiatan Bundo Kandung	15,000,000	15,000,000	-
								-
2	4				Bidang Pemberdayaan Masyarakat	140,276,974	166,026,974	25,750,000
2	4	1			Kegiatan PKK Nagari	30,000,000	30,000,000	-
2	4	2			Operasional PKK Kejorong	750,000	750,000	-
2	4	4			Kegiatan LPMN	12,000,000	12,000,000	-
2	4	5			Penyusunan RPJM dan RKP Desa	20,000,000	20,000,000	-

2	4	6				Pembinaan Kelompok Usaha Wanita	20,000,000	20,000,000	-
2	4	7				Kegiatan Pelatihan Kader Pemberdayaan masyarakat Nagari	22,526,974	22,526,974	-
2	4	8				Pembinaan dan pelatihan Pendidikan Anak Usia Dini	15,000,000	15,000,000	-
2	4	9				Pembinaan Kader Posyandu dan KB	15,000,000	15,000,000	-
2	4	0				Pembinaan Bakat seni dan Budaya	5,000,000	5,000,000	-
2	4	1				Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Nagari		23,000,000	23,000,000
2	4	1	1			Belanja Barang dan Jasa		23,000,000	23,000,000
2	4	1	1	1		Belanja Kontribusi Bimtek		15,000,000	15,000,000
2	4	1	1	2		Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi		4,000,000	4,000,000
2	4	1	1	3		Transportasi/Tiket Pesawat		4,000,000	4,000,000
2	4	2				Pembentukan Bumrag		2,750,000	2,750,000
2	4	2	1			Belanja Barang dan Jasa		2,750,000	2,750,000
2	4	2	1	1		Belanja ATK		250,000	250,000
2	4	2	1	2		Belanja Pembuatan Badan Hukum		2,000,000	2,000,000
2	4	2	1	3		Belanja Makan Minum Rapat		500,000	500,000
						SURPLUS / DEFISIT	(176,338,797)	(176,338,797)	-
									-
3						PEMBIAYAAN	176,338,797	176,338,797	-
3	1					Penerimaan Pembiayaan	326,338,797	326,338,797	-
3	1	1				SILPA	326,338,797	326,338,797	-
3	1	2				Pencairan Dana Cadangan Hasil Kekayaan Nagari Yang Dipisahkan			-
3	1	3							-
						JUMLAH (Rp)			-
									-
3	2					Pengeluaran Pembiayaan	150,000,000	150,000,000	-
3	2	1				Pembentukan Dana Cadangan			-
3	2	2				Penyertaan Modal Nagari (BUMNAG)	150,000,000	150,000,000	-

a. Pendapatan Asli Nagari :

Target PAN Sebelum Perubahan tahun 2015Rp. 110.000.000,-

Target PAN Perubahan tahun 2015	Rp. 115.650.000,-
Pencapaian Target tahun 2015	Rp. 102.116.300,-
Realisasi Pencapaian Target	Rp. 86.700.000,-
Sisa PAN tahun 2014	Rp. 15.416.300,-
Dengan Uraian Sebagai Berikut :	
1. Hasil Usaha Nagari	
Target APB Nagari th 2015	Rp. 0,-
Target APB Perubahan Nagari th2015	Rp. 3.000.000,-
Pencapaian Target	Rp. 0,-
2. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	
Target APB Nagari th 2015	Rp. 0,-
Target APB Perubahan th 2015	Rp. 0,-
3. Pendapatan Aset	
Target APB Nagari th 2014	Rp. 3000,000,-
Target APB Perubahan Nagari th 2014	Rp. 0,-
Pencapaian Target	Rp.0,-
4. PAN (Iyuran Nagari)	
Target APB Nagari th 2015	Rp. 110.000.000,-
Target APB Perubahan Nagari th 2015	Rp. 112.650.000,-
Pencapaian Target	Rp. 102.116.300,-
b. Dana Desa (APBN)	
Target APB Nagari th 2015	Rp. 497.526.974,-
Target APB Perubahan Nagari th 2015	Rp. 497.526.974,-
Pencapaian Target	Rp.482.526.974,-
Sisa	Rp. 15.000.000,-
c. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	
Target APB Nagari th 2015	Rp. 48.573.064,-
Target APB Perubahan Nagari th 2015	Rp. 48.573.064,-
Pencapaian Target	Rp.48.573.064,-

Realisasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp.31.110.000.-
Sisa	Rp.17.463.064,-
d. Dana A D N Nagari tahun 2015	
Jumlah dana A D N Tahun 2015	Rp. 1.440.000.000,-
Realisasi A D N Tahun 2015	Rp. 1.348.261.810,-
Sisa Dana A D N	Rp. 91.738.190,-
e. Bantuan Keuangan Provinsi	
Jumlah Dana Tahun 2015	Rp. 12.000.000,-
Realisasi Tahun 2015	Rp. 12.000.000,-
Sisa Dana	Rp. 0,-
f. Dana Silpa Tahun 2014	
Jumlah Dana Silpa Tahun 2014	Rp. 326.338.797,-
Realisasi Tahun 2015	Rp. 202.086.190,-
Sisa Silpa Tahun 2015	Rp.124.252.067,-
Jumlah Pendapatan	<u>Rp. 2.426.555.135,-</u>

3. Permasalahan dan Penyelesaiannya

a. Permasalahan

- 1) Pelaksanaan Pungutan Pendapatan Asli Nagari belum maksimal baik secara kualitas maupun kuantitas.
- 2) Pengawasan Pungutan belum Maksimal.
- 3) Belum adanya Perluasan Basis Penerimaan pendapatan asli nagari.

b. Penyelesaian

- 1) Secara Kualitas Pungutan Pendapatan Asli Nagari harus lebih ditingkatkan mulai perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi secara continue. Secara kuantitas perlunya sosialisasi tentang pentingnya peran aktif anak nagari dalam berpartisipasi dalam mewujudkan pembangunan.
Perlunya peningkatan baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi.
- 2) Perlunya peningkatan pengawasan secara terpadu baik secara administrasi maupun motivasi terhadap anak nagari.
- 3) Perlunya peningkatan Perluasan Basis Penerimaan Pendapatan Asli Nagari terutama tentang pengelolaan hasil perkebunan dan hasil industri. hal ini sangat domiinan karena produk unggulan nagari kinali pada saat ini bertolak dari sector perkebunan dan industry penunjangnya.

B. PENGELOLAAN BELANJA NAGARI

1. Kebijakan Umum Keuangan Nagari

2. Target dan realisasi belanja

a. PAN dan Silpa

Target Belanja PAN dan Silpa Awal Rp. 436.338.797,-

Target Belanja PAN dan Silpa Perubahan Rp. 441.988.797,-

Pencapaian Rp.428.455.097,-

Realisasi Belanja PAN dan Silpa Rp. 288.786.190,-

Sisa Rp.139.668.907,-

b. A D N

Rp.1.440.000.000,-

Realisasi Belanja Rp.1.348.261.810,-

Sisa Belanja Rp. 91.738.190,-

c. Dana Desa (APBN)

Rp 497.526.974,-

Realisasi Belanja Rp. 482.526.974,-

Sisa Rp. 15.000.000,-

d. Target Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Rp. 48.573.064,-

Realisasi Belanja Rp.31.110.000.-

Sisa Rp. 17.463.064,-

e. Bantuan Provinsi

Rp. 12.000.000,-

Realisasi Belanja Rp. 12.000.000,-

Sisa Rp. 12.000.000,-

Jumlah Belanja

Rp. 2.162.684.974,-

Jadi Silpa Tahun 2015 =Rp. 2.426.555.135,- – 2.162.684.974,-

=Rp. 263.870.161,-

Realisasi APB Perubahan Tahun 2015

Target Penerimaan Tahun 2015 ditambah Penerimaan Pembiayaan Rp.2.426.555.135,-

Realisasi Penerimaan Rp. 2.162.684.974,-

Realisasi APB Tahun 2015 dari rencana

Rp. 2.162.684.974,- X 100 % = 89,13 %
Rp.2.426.555.135,-

3. Permasalahan dan Penyelesaian

1. Sumber Daya Manusia di Nagari yang masih sangat minim baik secara kualitas dan kuantitasnya. (Permasalahan urusan Hak asal-usul Nagari)
2. Masih Kurangnya Pengkajian dan Penggalian Potensi Pengelolaan Sumber Daya alam dan Juga Hasil Industri serta limbah industry.(Permasalahan urusan Hak asal-usul Nagari)
3. Tidak jelasnya pelimpahan dan juga rekomendasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan juga Hasil industry serta limbah Industri. (Permasalahan urusan Pemerintah yang diserahkan kabupaten)
4. Perawatan dan Pemeliharaan Hasil Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah belum maksimal pemberdayaan dan pengelolaannya oleh kelompok masyarakat.(Permasalahan urusan Pemerintah yang diserahkan kabupaten)
5. Anak Nagari mayoritas tidak memahami akan idiologi adat basandi syara', syara' basandi kitabullah. Sebagai Landasan Idiel dalam kehidupan bernagari. (Permasalahan urusan Hak asal-usul Nagari)
6. Banyaknya sengketa tanah. (Permasalahan urusan Hak asal-usul Nagari)
7. Beberapa Pelaksanaan Pembangunan tidak memperhatikan analisis dampak lingkungan yang berakibat kontradiktif ditengah masyarakat. Sehingga berdampak kepada hasil pembangunan yang lainnya.(Permasalahan urusan Hak asal-usul Nagari)
8. Masih minimnya produk hukum nagari tentang pengelolaan sumber daya alam dan hasil industry.
9. Jumlah penduduk yang belum tertata dengan tepat
10. Tapal batas kejurongan yang belum jelas

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN NAGARI

A. URUSAN HAK ASAL USUL NAGARI

1. Program dan kegiatan

Dasar Hukum :

1. Peraturan Nagari Kinali Nomor : 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Kinali (RPJM-Nagari)
2. Perna 04 tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2015
3. Peraturan Nagari nomor : 05 tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Penerimaan dan Belanja (APB)Nagari Kinali Tahun 2015

Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan

- Pembangunan Jalan Usaha Tani dan Jembatan Jorong Limpato
 - Biaya Rp. 100.000.000,-
- Pembangunan Los Pasar Nagari Jorong Padang canduah
 - Biaya Rp. 125.000.000,-
- Pengerasan / Pembangunan Jalan Usaha Tani orong Anam Koto Utara
 - Biaya Rp. 125.000.000,-
- Pembangunan Jalan Usaha Tani Jorong Anam Koto Selatan
 - Biaya Rp. 100.000.000,-
- Pembangunan dan Perkerasan Jalan Usaha Tani Jorong Tandikek
 - Biaya Rp. 100.000.000,-
- Pembangunan Jalan Usaha Tani Rantau Panjang Jorong Langgam
 - Biaya RP. 100.000.000,-
- Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Padang guguak Jorong Langgam Saiyo
 - Biaya Rp. 100.000.000,-
- Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Dusun I dan II Jorong Bancah Kariang
 - Biaya Rp. 100.000.000,-
- Pembangunan dan Perkerasan Jalan Usaha Tani Bunuik
 - Biaya Rp. 100.000.000,-

Pembangunan tersebut telah terlaksana 100 % dan Hasil Pembangunan adalah merupakan barang inventaris nagari, yang selanjutnya tercatat dalam Buku Inventaris Nagari Kinali, Kartu Inventaris Barang (KIB) D

Kegiatan Pembinaan Masyarakat Nagari

1. Kerapatan Adat Nagari

Kegiatan Kerapatan adat Nagari diprioritaskan kepada pengkajian diskusi terbatas undang-undang no. 6 tahun 2014, hal ini menyikapi apakah, bagaimana, mengapa tindak lanjut strategi pelaksanaan pemerintahan Nagari Kedepan dan sebagian lain diperuntukan untuk belanja Barang dan jasa serta belanja modal KAN Kinali untuk tahun 2015.

2. Kegiatan Bundo Kandung

Kegiatan Bundo Kandung Nagari diprioritaskan kepada Pelatihan, operasional, belanja barang dan jasa serta belanja modal dalam kegiatan tahun 2015.

3. Kegiatan Bhabinkamtibmas/Bhabinsa/Linmas

Kegiatan Bhabinkamtibmas/Bhabinsa/Linmas Nagari diprioritaskan kepada Penyuluhan kepada Masyarakat disetiap Kejurongan di Nagari Kinali dan juga untuk belanja Barang dan Jasa.

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Nagari

1. Kegiatan PKK Nagari

Kegiatan PKK Nagari dilaksanakan untuk kegiatan pembinaan Kejurongan dan belanja barang jasa serta untuk kegiatan rutin senam sehat Nagari Kinali, itu telah berjalan dengan baik dan telah terelisasi hampir seratus persen.

2. Kegiatan PKK Kejurongan

Kegiatan PKK Kejurongan tidak terealisasi karena dana yang tersedia untuk kegiatan tersebut tidak mencukupi untuk direalisasikan.

3. Kegiatan LPMN

Kegiatan LPMN diperuntukan untuk Pelaksanaan Kegiatan Pra Musrenbang, Operasional dan belanja barang dan Jasa. sudah terealisasi hampir seratus persen.

4. Kegiatan Pelatihan Penyusunan RPJM dan RKP Nagari

Kegiatan ini bersumber dari Dana Desa tahun 2015 yang diperuntukan untuk Pelatihan Penyusunan RPJM dan RKP Nagari. Kegiatan ini sudah terlaksana dengan baik dan terealisasi seratus persen sesuai dengan anggaran yang tersedia.

5. Kegiatan Pembinaan Kelompok Usaha Wanita

Kegiatan ini juga bersumber dari Dana Desa tahun 2015 dimana kegiatan ini juga telah terlaksana dengan baik seratus persen sesuai dengan anggaran yang tersedia.

6. Kegiatan Pelatihan Kader Posyandu dan KB

Kegiatan ini bersumber dari Dana Desa tahun 2015, namun tidak terlaksana, dikarenakan waktu yang mepet dengan akhir tahun, sehingga dana menjadi Silpa di rek. Giro Nagari.

7. Kegiatan Pembinaan Bakat Seni dan Budaya.

Untuk kegiatan Pembinaan Bakat Seni dan Budaya Nagari merealisasikan untuk Pembelian Alat yang mendukung Kegiatan Seni Dan Budaya. Ini sudah terlaksana dengan Baik.

Rehab Kantor

Tahun 2015 Wali Nagari Kinali melaksanakan pembangunan Rehab Aset Nagari Bekas Kantor Ex PNPM yang Dananya bersumber dari belanja Modal senilai Rp. 40.000.000,- Ruang yang direhab hampir menyeluruh dan telah terlaksana dengan baik seratus persen.

Bumnag

Dana Bumnag yang telah disediakan tidak terealisasi, karena Pemerintah Nagari masih ragu dengan Petunjuk Teknis yang kurang jelas dari pihak yang terkait dalam proses pencairannya.

Belanja Operasional Kantor Nagari dan Bamus

Operasional Kantor dan Bamus Hampir terealisasi seratus persen, namun Ada Beberapa Belanja yang tidak dapat dilaksanakan, karena tidak sesuai dengan anggaran yang tersedia.

2. Permasalahan dan penyelesaiannya

Tidak terealisasinya sebagian Dana ADN dan Dana Desa disebabkan karena adanya beberapa belanja yang tidak sesuai dengan harga dilapangan, dan juga kegiatan yang bedekatan dengan akhir tahun, sehingga untuk pelaksanaannya tidak maksimal. Dan untuk tahun 2016 pemerintah Nagari berupaya untuk lebih memaksimalkan pencairan dana AND dan dana Desa tersebut agar dapat terealisasi secara keseluruhan, sehingga mampu meningkatkan pemerataan pembangunan disegala bidang serta menciptakan masyarakat yang sejahtera.

B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN

1. Program dan kegiatan

- a. Program Pemungutan Pajak Bumi dan bangunan tahun 2015.
- b. Program Percepatan Pendaftaran Tanah (BPN).

2. Realisasi Pelaksanaan kegiatan

PERDESAAN PERKOTAAN	DAN	18.458 stts	Target 535.789.035,-
			Realisasi 62% (332.189.202,-)

3. Permasalahan dan penyelesaiannya

- a. Tidak jelasnya pelimpahan dan juga rekomendasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan juga Hasil industry serta limbah Industri. (Permasalahan urusan Pemerintah yang diserahkan kabupaten)
- b. Perawatan dan Pemeliharaan Hasil Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah belum maksimal pemberdayaan dan pengelolaannya oleh kelompok masyarakat.(Permasalahan urusan Pemerintah yang diserahkan kabupaten).
- c. Belum adanya kesepakatan antara masing –masing pihak tentang tapal batas hutan lindung.
- d. Masih ada perbedaan kesepakatan antara pemerintah Kab. Pasaman dengan Kab.Pasaman Barat tentang batas wilayah administrasi.

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

1. Dasar Hukum

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 tahun 2011 tentang Pemerintahan Nagari; Perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Nagari;

Keputusan Wali Nagari nomor : /S.Keps/WN-Knl/ 2015 tentang penunjukan petugas PAD Nagari Kinali tahun 2015.

2. Instansi yang memberikan Pembantuan

Bupati Pasaman Barat melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

3. Satuan Pelaksana Kegiatan Nagari

Tim Petugas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan retribusi daerah.

4. Pelaksanaan Kegiatan Yang Diterima

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015.

5. Sumber dan jumlah anggaran

Pajak bumi dan bangunan bersumber dari wajib pajak diwilayah Nagari Kinali.

Target pajak bumi dan bangunan tahun 2015	535.789.035,-
Realisasi Nominal pajak bumi dan bangunan per 20 desember 2015	332.189.202,-
Realisasi Setoran pajak bumi dan bangunan per 20 desember 2015	332.189.202,-
Jumlah STTS	8.444
Prosentase pencapaian Target	62 %
Bagi hasil Pajak dan Retribusi yang diterima oleh pemerintah nagari	48.573.064,-

Realisasi belanja Bagi hasil pajak dan Retribusi yang diterima oleh pemerintah nagari dengan rincian	48.573.064,-
• Belanjaf insentif	Rp. 12.143.266,-
• Belanja Modal Petugas PAD	Rp. 12.143.266,-
• Belanja Operasional Petugas PAD	Rp. 24.286.532,-
Sisa Bagi hasil Pajak	Rp. 17.463.064
Realisasi belanja Bagi hasil Retribusi yang diterima oleh pemerintah nagari	Rp. 31.110.000,

6. Permasalahan

- Objek Pajak yang tercatat di dalam SPPT tidak sesuai dengan luas objek yang sebenarnya.
- Nama Subjek pajak banyak tidak sesuai dengan KTP dan Sertifikat.
- Nilai Pajak terlalu tinggi banyak masyarakat mengajukan pengurangan jumlah pajak terhutang.
- Objek Pajak banyak terjadi pemecahan namun di SPPT belum dipecah.
- SPPT banyak ganda pada pemecahan.
- Masih banyak tanah belum terdaftar sebagai objek pajak.

Penyelesaian

- Telah dilaksanakan inventarisasi permasalahan pajak pada tahun 2015.
- Pendaftaran tanah yang belum masuk sebagai objek pajak.

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

1. Dasar Hukum

- Undang – undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang – undang nomor 27 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan.

2. Urusan Pemerintahan yang ditugas Pembantuan

Bupati Pasaman Barat melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat.

Satuan pelaksana kegiatan Nagari

Petugas Kependudukan dan Pencatatan sipil Nagari.

Pelaksanaan Kegiatan Yang Diterima

Pelayanan dibidang Kependudukan (KK, KTP, Datang/Pindah, lahir dan meninggal).

3. Sumber dan jumlah anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemda Pasaman Barat .

4. Sarana dan prasarana

Prasarana yang diberikan adalah penyediaan blanko Kependudukan dengan Pengadaan Blanko F-1 hingga F-39.oleh Capil

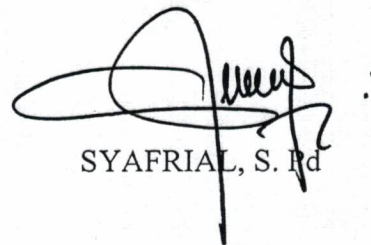
PENUTUP

Demikianlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini disusun, disajikan dan disampaikan untuk dapat dimaklumi adanya.

Kami sadari bahwa dalam menyusun laporan ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kami minta kepada Pimpinan beserta anggota Badan Permusyawaratan Nagari Kinali untuk dapat memberikan kritikan dan saran demi kesempurnaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Nagari untuk masa yang akan datang.

Kinali, Januari 2016

WALI NAGARI KINALI



SYAFRIAL, S. Pd



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
BADAN MUSYAWARAH
BAMUS

NAGARI KINALI KECAMATAN KINALI KABUPATEN PASAMAN BARAT
Alamat : Jl. M. Yunus No. 10 Durian Kilangan Telp (0753)Kode Pos 26367

BERITA ACARA
Nomor : ...D.I.../BAMUS/WN-KNL/II-2016

PERSETUJUAN BERSAMA
WALI NAGARI DAN BAMUS NAGARI KINALI

TENTANG
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) NAGARI KINALI
TAHUN 2015

Pada Hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Februari Tahun 2016, kami yang bertanda tanda tangan dibawah ini :

1. SYAFRIAL,S,Pd : Wali Nagari Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Nagari Kinali yang beralamat di Aur Badidik yang selanjutnya disebut *PIHAK PERTAMA*
2. ZAINUDDIN SYAM : Ketua BAMUS Nagari Kinali, dalam hal ini bertindak dan atas nama BAMUS Nagari Kinali selanjutnya disebut *PIHAK KEDUA*
3. ALI NASIR : Wakil Ketua BAMUS Nagari Kinali, dalam hal ini bertindak dan atas nama BAMUS Nagari Kinali selanjutnya disebut *PIHAK KEDUA*

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** Telah membahas dan menyetujui Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKJP) Nagari Kinali Tahun 2015 yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK KEDUA** telah menerima dengan baik Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Nagari Kinali Tahun 2015.
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan selambat – lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditanda tangani berita acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

WALI NAGARI KINALI

SYAFRIAL, S.Pd

BAMUS NAGARI KINALI
KETUA

ZAINUDDIN SYAM

BAMUS NAGARI KINALI
WAKIL KETUA

ALI NASIR



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
BADAN MUSYAWARAH

BAMUS

NAGARI KINALI KECAMATAN KINALI KABUPATEN PASAMAN BARAT

Alamat : Jl. M. Yunus No. 10 Durian Kilangan Telp (0753) 469088 Kode Pos 26367

SURAT KEPUTUSAN BAMUS NAGARI KINALI
KECAMATAN KINALI KABUPATEN PASAMAN BARAT

Nomor :Q.I...../BAMUS /II/2016

TENTANG

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) NAGARI KINALI TAHUN 2015

DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN MUSYAWARAH NAGARI KINALI

- Menimbang : a. Bahwa mencermati Penyampaian LKPJ Wali Nagari Kinali Tahun 2015 dilanjutkan kesidang Paripurna Bamus secara keseluruhan oleh Pimpinan Bamus beserta Anggota, maka perlu ditetapkan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Nagari Kinali Tahun 2015.
- b. Bahwa untuk pelaksanaan huruf a di atas perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Badan Musyawarah Nagari Kinali.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pe
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia No 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2014 Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 168, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5558).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata cara Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
8. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan desa, (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera barat Nomor 2 tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari;
11. Peraturan Daerah kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan nagari;
12. Peraturan Nagari Kinali Nomor: 04 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB) Tahun anggaran 2015
13. Peraturan Nagari Kinali Nomor : 05 Tahun 2015 Tentang Perubahan Anggaran Penerimaan dan Belanja (APB) Nagari kinali tahun 2015.

- Memperhatikan
1. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Nagari Kinai Tahun 2015 Yang di sampaikan oleh Wali Nagari Kinali Pada Tanggal 11 februari Tahun 2016
 2. Sidang PLENO BAMUS Nagari Kinali yang dilaksanakan pada hari Selasa Tanggal 16 Februari 2016.
 3. Sidang Paripurna Bamus Nagari Kinali tanggal 25 Februari 2016 Tentang Penetapan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Nagari Kinali tahun 2015.

MEMUTUSKAN

- Pertama Mengesahkan dan menerima Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Nagari Kinali Tahun 2015 .
- Kedua Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Durian Kilangan
Pada Tanggal : 25 Februari 2016.
Badan Musyawarah Nagari Kinali

KETUA



ZAIUDDIN SYAM

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Bapak Bupati Pasaman Barat C.q Kabag Pemerintahan Nagari Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek.
2. Bapak Camat Kecamatan Kinali di Basung Indah
3. Wali Nagari Kinali di Durian Kilangan.
4. Pertiagal



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KECAMATAN KINALI
BAMUS NAGARI KINALI

ALAMAT : JL.M.YUNUS NO. DURIAN KILANGAN KINALI KODE POS 26367

Kinali, 23 Februari 2016

Nomor : 005/07/BAMUS/II-2016
Lamp. : -
Perihal : Undangan.

Kepada Yth :

1. Wali Nagari Kinali
2. Wakil Ketua Bamus
3. Anggota Bamus.

Di

Kinali

Dengan hormat,

Setelah dilaksanakannya Sidang Pleno Bamus Nagari Kinali pada hari Selasa Tanggal, 16 Februari 2016 tentang Pembahasan LKPJ Nagari Kinali Tahun 2015, Maka perlu dilanjutkan kesidang Paripurna, Untuk itu Kami undang Bapak/Ibu hadir pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 25 Februari 2016
Pukul : 8.30 Wib S/d Selesai
Tempat : Kantor Bamus Nagari Kinali
Acara : Sidang Paripurna Penetapan LKPJ Nagari Kinali Tahun 2015.

Demikianlah undangan ini kami sampaikan atas kehadirannya , kami ucapkan terima kasih.

BAMUS NAGARI KINALI

KETUA

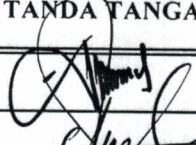



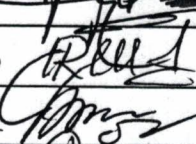


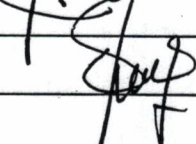
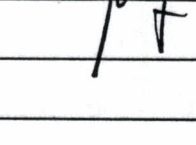
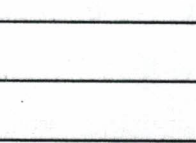
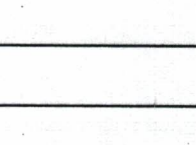
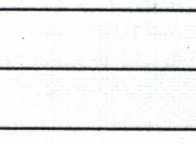
ZAINUDDIN SYAM

Tembusan :

1. Bapak Bupati Pasaman Barat C.q Kabag Pemerintahan Nagari di Simpang Ampek.
2. Bapak Camat Kecamatan Kinali di Basung Indah.
3. Peringgal

DAFTAR HADIR BAMUS NAGARI KINALI

Acara : SIDANG PARIURAH KRPI NAGARI TAHUN 2015
 Hari / tgl : KAMIS . 25 FEBRUARI 2016
 Tempat : KANTOR BAMUS NAGARI KINALI

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN	KET
1	Joni Karman. S.Pd	Anggota	Rampuk Noto		
2	Syafriz	Anggota	Dr. Filang		
3	TUS BALEKUBON - II -	W. Koto			
4	H.M.DI. PLYBAY	Anggota	W. Koto		
5	ALIASIR	Ulu Batus	Sirali		
6	Zainuddin Sy	Imp Batus	W. Koto		
7	REKTA RENA	Anggota	langgamsajo		
8	Murchmansag	Anggota	Anch Kay		
9	SUKANTI	sekdam	Siddinjo		
10	Jon Wely V	Anggota	Dr. Z. Jay		
11	Anie.	Angg	Kudi		
12	Syafriz	Wali Nagari	Kudati		
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

BAMUS NAGARI KINALI

KETUA


ZAINUDDIN SYAM

Notulen Rapat Sidang Paripurna Bamus Nagari Kinali

Pada Hari : Kamis
Tanggal : 25 Februari 2016
Pimpinan Rapat : Ketua Bamus Nagari Kinali
Tempat : Kantor Bamus Nagari Kinali
Notulis Rapat : Sekretaris Bamus Nagari Kinali
Acara : Sidang Paripurna Penetapan LKPJ Nagari Kinali Tahun 2015.

Kesimpulan : Setelah melakukan Sidang Paripurna LKPJ Nagari Kinali Tahun 2015, maka Bamus Nagari Kinali telah menerima dan Mengesahkan LKPJ Nagari Kinali Tahun 2015 tersebut.

Disetujui Oleh :
Bamus Nagari Kinali



ZAINUDDIN SYAM

Sekretaris Bamus



SUKANTI